



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERMASALAHAN DAN ISU AKTUAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH JAWA DAN BALI



G20
INDONESIA
2022



DR. TEGUH SETYABUDI, M.PD
Dirjen Bina Bangda



Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri



Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret 1967

HP. 0811858973

Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

JABATAN : DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PEKERJAAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Staf di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1993 – 1998 |
| 2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1998 – 2003 |
| 3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri | Th. 2003 – 2010 |
| 4. Karo Umum Setjen Kemendagri | Th. 2010 – 2014 |
| 5. Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri | Th. 2014 – 2016 |
| 6. Kepala BPSDM Kemendagri | Th. 2016 – 2022 |
| 7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara | Th. 2018 |
| 8. Pjs. Gubernur Kalimantan Utara | Th. 2020 |
| 9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Th. 2022 – Saat ini |



Proses Bisnis Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) di Direktorat PEIPD



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah

William Dunn dalam
Budi Winarno (2007:
32-34)

Penyusunan Agenda

Formulasi
Kebijakan

Adopsi
Kebijakan

Implementasi
Kebijakan

Evaluasi
Kebijakan



Penjaringan
Permasalahan

- Penyampaian Format Pembahasan dalam Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022;
- Penyampaian Format Pembahasan dalam KOPI Sumatera, dan sebagainya
- Forum pertemuan rutin lainnya (fasilitasi, Evaluasi, dan Sebagainya)



Penentuan
Prioritas
Permasalahan

- Pembahasan dengan daerah dalam Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022;
- Pengkajian Internal Dit. PEIPD dengan output Laporan Substantif Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022;
- FGD 5 Regional.



Perumusan dan
Pemilihan Solusi

- Pembahasan Internal Dit. PEIPD;
- Pengkajian Internal Dir. PEIPD dengan output Laporan Substantif Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022;
- FGD 5 Regional.
- Perumusan Kebijakan Intervensi.

FGD 5 Regional



Implementasi
Solusi

- Sosialisasi Kebijakan;
- Pelaksanaan Kebijakan di daerah.



Pengendalian
dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi kebijakan dengan mengadakan jajak pendapat di daerah;
- Penerimaan masukan dari berbagai instansi pusat dan daerah dalam perbaikan kebijakan.

Siklus Perumusan
Kebijakan

Penentuan Prioritas Permasalahan dan Perumusan dan Pemilihan Solusi

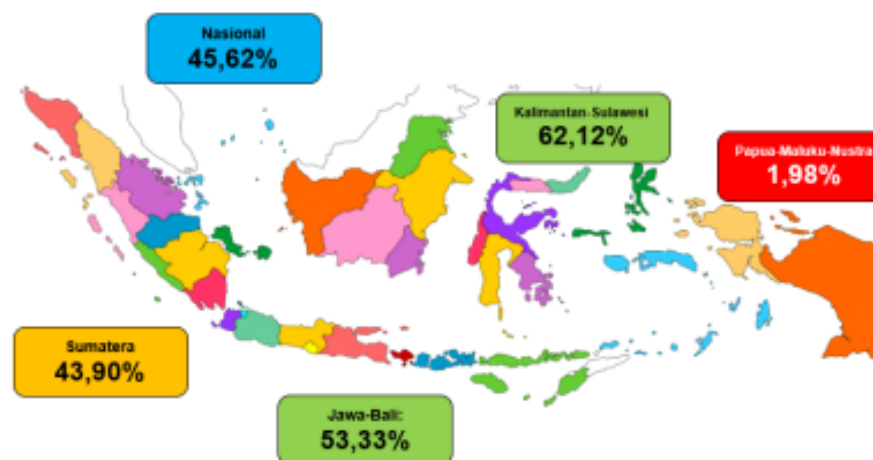
Laporan Substansial Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah



Memuat analisis terhadap hasil isian format Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022



Gambar 1. Persebaran Umpan Balik atas Format Rakor Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2022

Berhasil memetakan
49
Permasalahan

Responden yang diberikan format merupakan 548 Bappeda (Provinsi /Kebupaten/Kota) Seluruh Indonesia, namun **hanya 250** yang memberikan umpan balik.

Beberapa Kebijakan yang sudah dan akan terbit menggunakan pendekatan berbasis bukti



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah

No	Produk Hukum	Substansi Masukan	Status
1	Inmendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 bagi Daerah dengan AMJ Tahun 2023-2026 dan Daerah Otonom Baru	Memperlengkapi materi kebijakan yang tidak diatur dalam Inmendagri No. 17 Tahun 2021	Terbit
2	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	Pedoman evaluasi bagi daerah Sasaran Pokok Kualitatif	Penandatanganan MDN
3	Permendagri tentang RKPD Tahun 2024	Penerbitan sesuai dengan Pasal 75 PMDN 86/2017 (saat penyusunan Ranwal) dan Peningkatan Kapasitas SDM Perencana	Pembahasan dengan K/L Terkait
4	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045	Membutuhkan penjelasan substansi lebih mendetail dari PMDN 86/2017	Pembahasan dengan K/L Terkait

Goal Setting FGD Regional



Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah

1. Memutuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk diselesaikan;
2. Penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan;
3. Penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang sudah ditawarkan.



Penuangan
Berita Acara
Hasil FGD yang
memuat
Keputusan Goal
Setting FGD.





Hasil Pemetaan permasalahan dan isu strategis beberapa wilayah

- 1) Perlunya kepastian perumusan rincian belanja, apakah masuk dalam ranah perencanaan pembangunan (RKPD) atau perencanaan anggaran (APBD);
- 2) Daerah merasa kesulitan dalam menyajikan data perencanaan pembangunan yang berkualitas terutama dalam melakukan analisis data yang didapatkan sebagai penunjang dalam perumusan kebijakan perencanaan;
- 3) Proses bisnis yang ada dalam SIPD sudah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan di daerah, namun perlu dikembangkan modul terkait pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang sampai saat ini belum tersedia;
- 4) Daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola Pokok Pikiran DPRD baik dalam teknis pengintegrasian/akomodir dalam RKPD yang terkadang menghambat proses perencanaan dan penganggaran dan teknis input dalam aplikasi SIPD;
- 5) Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharapkan dapat menyederhanakan tahapan perencanaan pembangunan di daerah serta dapat mensinergikan tahapan perencanaan dan penganggaran yang saat ini masih belum terintegrasi dengan baik;
- 6) Berkaitan dengan sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah, Daerah mengharapkan sinkronnya kebijakan antara Kemendagri yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Bappenas yakni seperti dalam substansi kebijakan yang ada dalam RKPD Tahun 2024, RPJMD Tahun 2025-2030, dan RPJPD Tahun 2025-2045.
- 7) Daerah berharap beberapa kebijakan yang sedang dirumuskan Ditjen Bina Bangda seperti SE tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, SE tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan terutama Permendagri tentang Pedoman RKPD Tahun 2024 yang selama kerap mengalami keterlambatan penerbitan.





TERIMA KASIH

